



SKRIPSI

Judul:

Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak
Pidana Khusus (Extraordinary Crime) Dalam
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023

Disusun oleh:

EWA PRILYANDI FAHMI
NIM. 205170237

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK
PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ewaprilyandi Fahmi Saputra
NIM : 205170237

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : EWA PRILYANDI FAHMI
NIM : 205170237
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak
Pidana Khusus (Extraordinary Crime) Dalam Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2023
Title : Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak
Pidana Khusus (Extraordinary Crime) Dalam Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2023

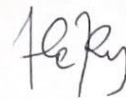
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

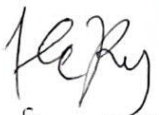
Persetujuan

Nama : EWA PRILYANDI FAHMI
NIM : 205170237
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak
Pidana Khusus (Extraordinary Crime) Dalam Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2023

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016


Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

Pernyataan

Nama : EWA PRILYANDI FAHMI
NIM : 205170237
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak
Pidana Khusus (Extraordinary Crime) Dalam Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



EWA PRILYANDI FAHMI
NIM. 205170237

ABSTRAK

- A. Nama : Ewaprilyandi Fahmi Saputra (NIM: 205170237)
- B. Judul : Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- C. Halaman : xi+119+lampiran+2024
- D. Kata Kunci : Korupsi, Tindak Pidana Khusus, UU No. 1 Tahun 2023.
- E. Isi : Dampak signifikan yang merugikan banyak aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi membutuhkan pengaturan khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur terkait tindak pidana korupsi, publik khawatir bahwa kekhususan tindak pidana korupsi menjadi hilang dan melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah berkembang dari masa ke masa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aspek hukum dari pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 dan literatur hukum terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai landasan hukum dan perkembangan regulasi tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana korupsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang penanganannya mengacu pada ketentuan perundang-undnagan khusus terkait tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa dalam prinsip hukum, terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan khusus terkait tindak pidana korupsi dapat mengenyampingkan ketentuan umum seperti di dalam UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dilakukan dalam rangka kodifikasi peraturan pidana di Indonesia sehingga keseluruhannya terintegrasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tersebut.
- F. Daftar Acuan : 96 (1982-2023)
- G. Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA.
- H. Penulis : Ewaprilyandi Fahmi Saputra

ABSTRACT

- A. Name : Ewaprilyandi Fahmi Saputra (NIM: 205170237)
- B. Title : Legal Review of the Regulation of Corruption Crimes as Special Crimes in Law Number 1 of 2023
- C. Page : xi+119+attachment+2024
- D. Keywords : *Corruption, Special Crimes, Law Number 1 of 2023.*
- E. Abstract : *The significant impact that is detrimental to many aspects of national and state life resulting from criminal acts of corruption requires special arrangements in efforts to prevent and eradicate it. Since the enactment of Law Number 1 of 2023 (UU No. 1 of 2023) which regulates criminal acts of corruption, the public is concerned that the specificity of criminal acts of corruption is being lost and weakening efforts to eradicate criminal acts of corruption which have been developing over time. This thesis aims to analyze and examine the legal aspects of the regulation of criminal acts of corruption as a special criminal act in Law no. 1 of 2023. This research uses normative research methods, by collecting data from various legal sources, including Law no. 1 of 2023 and the latest legal literature. This approach aims to provide a comprehensive picture of the legal basis and development of regulations for criminal acts of corruption. The results of this research show that based on Law no. 1 of 2023, criminal acts of corruption are still categorized as special criminal acts whose handling refers to special statutory provisions related to criminal acts of corruption. Considering that in legal principles, there is the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, special provisions related to criminal acts of corruption can override general provisions such as in Law no. 1 of 2023. Thus, the regulation of criminal acts of corruption in Law no. 1 of 2023 was carried out in the context of codifying criminal regulations in Indonesia so that all of them are integrated in Law no. 1 of 2023.*
- F. References : 96 (1982-2023)
- G. Supervisor : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- H. Penulis : Ewaprilyandi Fahmi Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar).

Penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan FH Untar;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 FH Untar;
3. Bapak Dr. Hery Fimansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
4. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium FH Untar; dan
5. Seluruh keluarga, saudara, rekan, maupun sahabat yang tidak dapat disebut satu per satu.

Adapun saya sangat menghargai segala saran dan kritik yang membangun demi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indoensia, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi.

Akhir kata, saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna dan menjadi landasan bagi penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2023

Ewaprilyandi Fahmi Saputra

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	
COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	vii
Daftar Singkatan	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
a. Jenis Data	14
b. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Pendekatan Penelitian	16
5. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	18
KERANGKA TEORITIS	18

BAB III	50
DATA HASIL PENELITIAN	50
A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	50
B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	76
C. Data Hasil Wawancara	81
BAB IV.....	90
ANALISIS PERMASALAHAN.....	90
BAB V	103
KESIMPULAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Tabel 2. Pengaturan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tabel 3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tabel 4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023

Daftar Singkatan

KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945